No. 6 Meil 2017

INSA NEWS

PUBLISH BY INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION

INSA DUKUNG PEMANDUAN SELAT MALAKA

PEMERINTAH HANYA AKUI INSA CARMELITA HARTOTO

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3456540
Fax : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : UM.003/41/10/DPL-17
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Status Legal Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/ *Indonesian National Shipowners Association* (INSA)

Jakarta, 26 Mei 2017

Kepada
Yth.
1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
3. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
4. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Di

TEMPAT

1. Menunjuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 66/G/2016/PTUN.JKT tanggal 30 Agustus 2016 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana disampaikan melalui surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/ *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) Nomor 071/HUBLA/V/2017.

2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Status Legal Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/ *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) agar dapat diketahui dalam pelaksanaannya oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan *stakeholders* terkait.

3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. KONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

Model Takah 02

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

Carmelita Hartoto

Ketua Umum DPP INSA

MENANGKAP PELUANG

Kini peran atase perdagangan dan *Indonesia Trade Promotion Center* bakal bertambah menjadi agen bisnis sejalan dengan target pemerintah menggenjot ekspor.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan mengungkapkan reposisi akan dilakukan terhadap tugas dan fungsi atase perdagangan serta *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC).

Peran mereka yang tadinya hanya sebatas birokrasi akan bertambah menjadi birokrat dan agen bisnis. Mereka ditempatkan di sana diharapkan dapat menjadi ujung tombak kita.

Kebijakan pemerintah itu perlu di apreasi oleh semua pihak dan sektor. Promosi dagang yang dilakukan oleh atase perdagangan tersebut, mungkin akan lebih berdampak luas apabila sektor-sektor lainnya ikut dilibatkan seperti industri, keuangan dan perhubungan khususnya angkutan laut.

Promosi dagang, dipastikan tidak berdiri sendiri. Ada sektor-sektor lain yang mungkin bisa memberi kontribusi dan manfaatnya bagi kepentingan ekonomi nasional. Promosi dagang itu akan lebih lengkap bila potensi industri, fasilitas keuangan nasional dan peranan pelayaran dengan bendera Merah-Putihnya.

Untuk sektor angkutan laut, Pemerintah Indonesia juga bisa menawarkan kapal-kapal berbendera Indonesia untuk digunakan dalam kegiatan ekspornya. Posisi tawar, mungkin bisa melibatkan untuk memberi kesempatan kepada pelayaran nasional mendorong dukungannya dalam kegiatan ekspor komoditas nasionalnya. Mudah-mudahan potensi pelayaran nasional bisa berperan lebih optimal.

Pemerintah menginginkan perwakilan mereka yang ada di luar negeri untuk mendukung kebijakan yang ada di tingkat pusat. Diharapkan, mereka dapat lebih banyak mengundang dan menarik minat investasi calon pembeli nasional.

Dengan reposisi tersebut mereka memasarkan produk-produk kita atau sebagai sales manager.

Mengenai kebijakan Dirjen Perhubungan Laut menyoal uang jaminan kontainer bagi pelayaran, sebenarnya tidak pula di permasalahkan, karena hal itu bisa kita serahkan kepada masing-masing pengguna jasa. Artinya pemerintah memberikan rambu-rambunya dan kedua belah pihak menyesuaikan secara tepat.

Kebijakan pemerintah itu ingin memperjelas saja, karena ketentuan di lapangan banyak dipengaruhi oleh hubungan mereka dalam berbisnis dan soal kepercayaan. Berbisnislah secara sehat, semoga kita tetap sukses. Salam Indonesia.!

Pimpinan Umum:
CARMELITA HARTOTO

Wakil Pimpinan umum/ Penanggung Jawab :
BUDHI HALIM

Pimpinan Redaksi :
DARMANSYAH

Pimpinan Perusahaan :
NOVA MUGIANTO

Redaktur :
CAPT. ZAENAL ARIFIN
HENDRAWAN
HILMAN
FAJAR

Diterbitkan oleh:

(Indonesian Nasional Shipowners Association)
Jl. Tanah Abang III No. 10 Jakarta

6 INSA DUKUNG PEMANDUAN SELAT MALAKA & KUALA TANJUNG

Pemanduan di Selat Malaka merupakan satu upaya maju dari pemerintah untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu melayani kegiatan pemanduan di Selat Malaka, demikian dikemukakan oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.

8 *TRANSHIPMENT* JAKARTA PERLU DUKUNGAN

Visi pemerintah adalah menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Oleh karena itu upaya Pelindo II merealisasikan *transshipment* Jakarta dengan masuknya kapal CMA-CGM berkapasitas 8.500 TEUs-10.000 TEUs sangat positif. Demikian antara lain ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

10 KENAPA PELAYARAN KITA SULIT BERSAING

Seperti diketahui Mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim sebagaimana era Majapahit dulu menjadi obsesi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun mayoritas masyarakat negeri ini. Namun potensi maritim di Nusantara selama ini bukan menjadi prioritas, karena pada era orde baru lebih mengutamakan daratan dibandingkan kelautan, padahal semua tahu bahwa luas laut Indonesia sangatlah luas.

18 MENTERI LUHUT KE STAND INSA

Wilayah laut kita ini menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim,Luhut B. Panjaitan, lebih dari 75% di banding daratan dengan demikian seharusnya 75% warga Indonesia lebih berorientasi ke laut.

18 CARMELITA HARTOTO RAIH DUA PENGHARGAAN

Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto raih dua penghargaan sebagai bukti kiprahnya di dunia bisnis industri pelayaran nasional. Hal ini menjadi pemicu Carmelita Hartoto untuk semakin memberikan kontribusi kepada organisasi dan industri pelayaran nasional.

24 PROPAN MARINE SIAP BERKONTRIBUSI DALAM MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA

Pertemuan Menhub Budi Karya Sumadi dengan pengusaha pelayaran Indonesia dan Singapore di Kedubes RI untuk Singapore mempromosikan pemanduan Selat Malaka dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

INSA DUKUNG PEMANDUAN SELAT MALAKA & KUALA TANJUNG

Pemanduan di Selat Malaka merupakan satu upaya maju dari pemerintah untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu melayani kegiatan pemanduan di Selat Malaka, demikian dikemukakan oleh Ketua Umum INSA **Carmelita Hartoto.**

Seperti diketahui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama pengusaha pelayaran Indonesia dan Singapura mengadakan pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Agenda pertemuan tersebut adalah mempromosikan pemanduan di Selat Malaka kepada pelayaran dan operator pelabuhan di Singapura.

Langkah pemerintah mempromosikan pemanduan Selat Malaka mendapat dukungan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) yang pada pertemuan tersebut DPP INSA turut hadir menjadi perwakilan dari perusahaan pelayaran Indonesia.

Atas kemampuan itu maka, sambung Carmelita, INSA yang merupakan asosiasi pelayaran Indonesia mendukung dengan mengarahkan pelayaran nasional anggota INSA supaya kapal-kapal yang melintasi kawasan tersebut memanfaatkan jasa pemanduan Indonesia.

"Pertemuan ini juga membuka peluang bagi pelayaran Indonesia dan Singapura untuk menjalin kerja sama di sektor maritim lainnya," kata Carmelita kepada INSA News.

INSA juga mendukung upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi hub internasional. Saat ini, pe-

nyiapan infrastruktur transportasi telah disiapkan Kemenhub, yakni dengan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pembangunan akses kereta api dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangke ke Pelabuhan Kuala Tanjung.

Diharapkan upaya-upaya yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia dan cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim segera terwujud.

Seperti diketahui, pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura telah di-*launching* pada tanggal 10 April 2017 di Batam. Jasa pemanduan yang disediakan oleh Pelindo I adalah Iyu Kecil - Nongsa (70 NM), Horsburgh - One Fanthom Bank (260 NM), Horsburgh - Dumai (220 NM), Horsburgh - Pulau Berhala (425 NM), Horsburgh - Lhokseumawe (540 NM), Horsburgh - Pulau Sabang (680 NM) dan sebaliknya.

Dibawa ke Beijing

Sementara itu dalam forum *Belt and Road Initiative* atau Prakarsa Sabuk dan Jalur Sutra di Beijing China. Pemerintah Indonesia ingin membawa angin segar bagi investor asing. Kesan ini muncul ketika Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di acara tersebut pihak inisiator yaitu china mengantongi dana US Dollar 3 triliun bila negeri ini menggunakan US Dollar 1 triliun saja yakin bisa membantu perekonomian di berbagai negara, walau begitu kita tetap harus hati-hati, kita tidak akan menjadikan investasi ini menjadi pinjaman karena kita ingin mempertahankan posisi hutang kita kurang dari 30% dari GDP (*gross domestic produck*).

Luhut menceritakan tugas pemerintah memfasilisatsi dan memberi kemudahan bagi mewujudkan kerjasama serta memberi insentif seperti *tax holiday*. Pemerintah sendiri sedang mempertimbangkan untuk terwujudnya mega proyek kedua pelabuhahan yaitu Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Pemerintah yakin dari forum itu bisa menstimulus percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan transportasi di Indonesia. Lagipula, forum tersebut menawarkan mekanisme kerjasama antar badan usaha bukan proyek pinjaman.

Para Pengamat seperti **Saud Gurning** mengimbau pemerintah agar fokus pada target komersisal privatisasi dalam pemilihan calon operator pelabuhan global dan *main line opeartor* (MLO) yang potensial dalam mengelola pelabuhan. Dengan penawaran kepada investor asing diingatkan pemerintah juga harus konsisten dalam menyusun kerjasama dan perlu di pertimbangkan dan dipastikan adanya kapal-kapal besar yang akan menyinggahi pelabuhan tersebut dalam kaitan usahanya. ●

40 PANDU PROFESIONAL DISIAPKAN UNTUK SELAT MALAKA

PT Pelindo I sudah menyiapkan sebanyak 40 tenaga pandu profesional untuk pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura, menyusul diperbolehkannya Indonesia melakukan pemanduan di Selat tersebut. Sekretaris Perusahaan Pelindo I, **M Eriansyah Boy** mengatakan, Sebagian dari tenaga ahli tersebut sudah mendapatkan pelatihan di luar negeri.

"Pihaknya sudah hampir dua tahun mempersiapkan tenaga pandu yang akan melayani kapal-kapal di lintasan kedua selat itu," ujar Boy panggilan akrabnya, di Medan.

Menurut Boy, tenaga pandu tersebut akan ditempatkan di tiga titik masing-masing Batam, Tanjunguban dan Pulau Berhala.

Sementara itu, Asisten Corporate Secretary Pelindo I Medan, **Fiona Sari Utami** mengatakan, jika dikelola dengan maksimal, potensi pendapatan Pelindo I dari pemanduan kapal asing dan kapal domestik di Selat Malaka dan Selat Singapura bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun.

Dirut PT Pelindo I (Persero) Bambang Eka Cahya (ketiga kanan) menyerahkan sertifikat pemanduan kapal kepada petugas pemanduan kapal disaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono (kedua kanan) usai peresmian jasa layanan pemanduan dan penundaan kapal laut asing dan domestik di Batam, Kepulauan Riau. (foto antara)

"Tahun ini pendapatan Pelindo I dipastikan bakal meningkat signifikan. Kepastian itu diperoleh setelah Kementerian Perhubungan menunjuk Pelindo I sebagai operator yang memandu kapal asing dan domestik di Selat Malaka dan Selat Singapura," ujarnya. ●

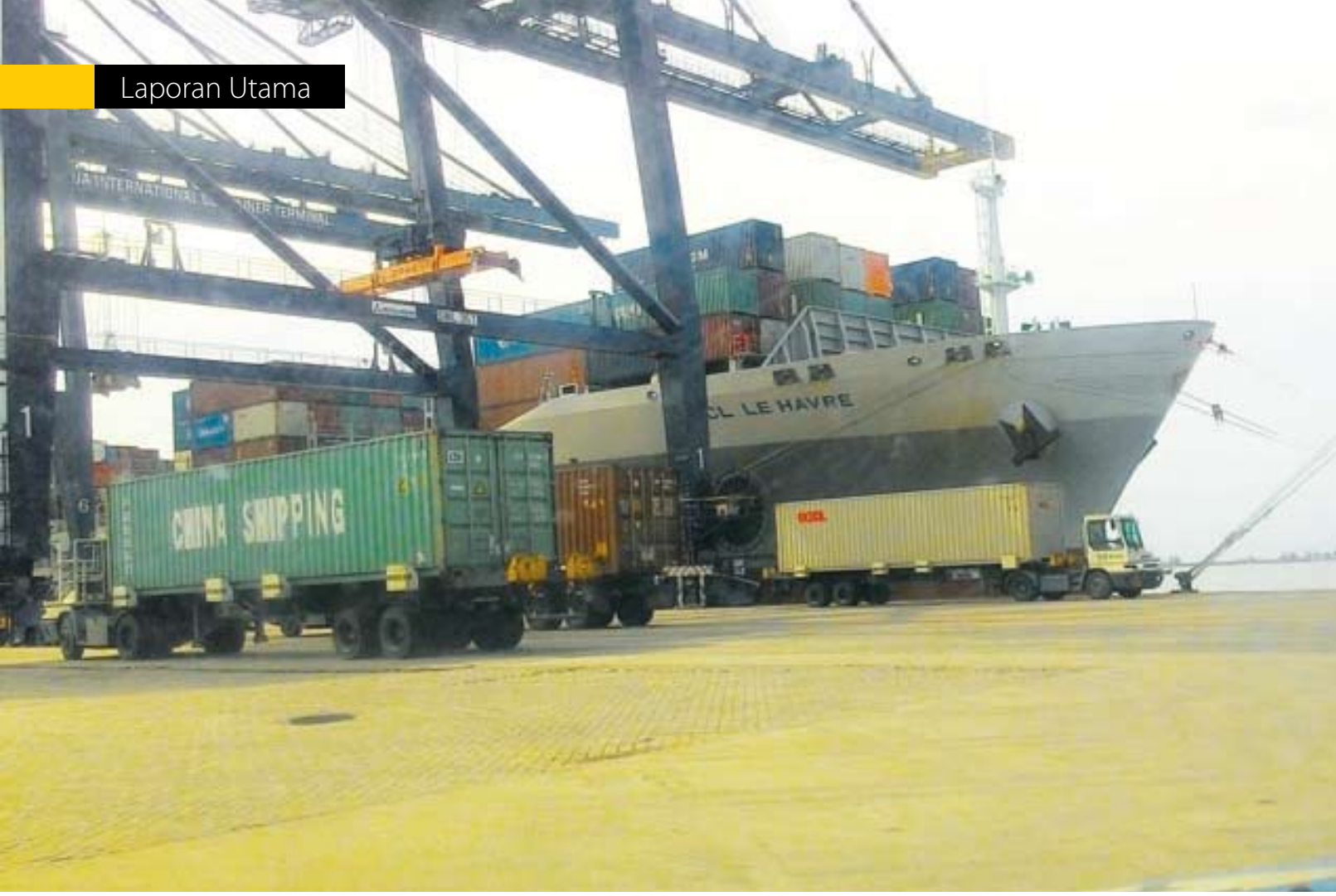

Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Priok.

TRANSHIPMENT JAKARTA PERLU DUKUNGAN

Visi pemerintah adalah menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Oleh karena itu upaya Pelindo II merealisasikan *transshipment* Jakarta dengan masuknya kapal CMA-CGM berkapasitas 8.500 TEUs-10.000 TEUs sangat positif. Demikian antara lain ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Dalam Rakornas tersebut juga ditegaskan kembali pentingnya Indonesia berperan untuk meningkatkan potensi kelautannya baik industri maupun jasa maritim.

Karena itu, Ketua Umum DPP INSA **Carmelita Hartoto** menyatakan bahwa apa yang menjadi cita-cita Presiden Jokowi dalam mengembalikan kejayaan maritim dan *transshipment port* Jakarta perlulah didukung dan diapresiasi. "Dan ini menjadi tantangan untuk Pelindo maupun pihak pelayaran

untuk bekerja keras lebih efisien," kata Carmelita kepada *INSA News*.

Pelindo, ujar Meme (panggilannya), juga harus lebih bagus memberikan *service* yang lebih baik dibandingkan PSA Singapura, juga bisa memberikan insentif pada pihak pelayarannya seperti tarif dibawah PSA. "Pelayarannya sendiri harus juga dapat memberikan *freight* yang kompetitif yang lebih baik sehingga pemilik barang yang biasa kirim kargo dari luar Priok tertarik untuk kirim melalui Tanjung Priok karena lebih murah dan lebih cepat. Itu tantangan dan bias agar rute ini bisa berjalan untuk seterusnya," ucapnya.

Diminta tanggapannya tentang Kuala Tanjung yang juga direncanakan sebagai *transshipment hub*, Carmelita menyatakan, untuk Kuala Tanjung keyakinan Presiden Jokowi sangat besar. "Kuala Tanjung bisa menjadi hub international karena merasa ada dukungan dari *Port of Roterdam* dan *Dubai Port*. Harapan saya sih ada *shipping line* besar juga yang ikut disitu, karena hub internasional kan *shipping lines*-nya yang tentukan," kata Meme.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk memberikan acuan penyusunan program dan kebijakan di bidang kemaritiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Dokumen Nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pengurangan *Dwelling Time*

Sementara itu, untuk mengimplementasikan Perpres Nomer 16/2017 ini, Kemenko Bidang Kemaritiman menggelar pada 4 Mei 2017.

Menko Maritim **Luhut Pandjaitan** juga memberikan laporan mengenai capaian program-program prioritas di bidang kemaritiman yang telah berjalan.

Capaian-capaian tersebut antara lain pengurangan *dwelling time* dan biaya logistik di pelabuhan, nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam, serta pencapaian program pariwisata melalui penetapan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).

Menko pun menyampaikan tentang program bidang kemaritiman yang memiliki misi pemerataan, antara lain Tol Laut, pembangunan Infrastruktur di luar Jawa termasuk elektrifikasi serta pembangunan pulau-pulau terdepan.

Sementara itu Plt. Sesmenko Maritim **Ridwan Djamaluddin** dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa program tol laut telah berhasil mengurangi disparitas harga di Indonesia Timur.

"Ada penurunan antara 20-25% di beberapa tempat yang dilalui oleh trayek tol laut," ujarnya.

Selain melaporkan tentang capaian program pemerintah di bidang Kemaritiman, lanjut Ridwan, tujuan diadakannya Rakornas adalah untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan program kerja dan kebijakan di bidang kemaritiman.

Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan agar arah kebijakan dan program kemaritiman menjadi jelas dan terukur sehingga ada percepatan realisasi misi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, tutur Ridwan.

Rakornas dihadiri oleh sejumlah pejabat dan menteri di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, Gubernur, Walikota, dan Bupati seluruh Indonesia.

Lebih detil, Pembangunan Poros Maritim meliputi lima pilar, yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

"Di dalam lampiran Perpres juga memuat tentang rencana aksi dengan target *output, timeline* dan penanggung jawab yang jelas," tambah Ridwan.

Rencana aksi tersebut merupakan bentuk implementasi lima pilar pembangunan poros maritim. Lebih jauh, posisi strategis Indonesia, beserta faktor geografis dan kondisi sosial ekonominya, juga menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional.

Oleh karena itu, menurut Ridwan arah kebijakan kelautan dan kemaritiman RI yang jelas menjadi sebuah hal yang urgen. ●

KENAPA PELAYARAN KITA SULIT BERSAING

Belajar dari Tianjin, Presiden Joko Widodo akan Kembangkan 24 Pelabuhan di Indonesia.

Seperti diketahui Mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim sebagaimana era Majapahit dulu menjadi obsesi pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla maupun mayoritas masyarakat negeri ini. Namun potensi maritim di Nusantara selama ini bukan menjadi prioritas, karena pada era orde baru lebih mengutamakan daratan dibandingkan kelautan, padahal semua tahu bahwa luas laut Indonesia sangatlah luas.

Presiden Jokowi, ketika berpidato resmi pertama kali dihadapan parlemen menyerukan sebuah ungkapan yang cukup membangkitkan semangat masyarakat kalangan maritim, sebab kata Presiden 'kita tak lagi memunggungi laut', artinya kekayaan sumber daya kelautan akan dioptimalkan oleh bangsa dan Negara untuk kemakmuran masyarakat Indonesia melalui konsep maritim.

Sayang, dalam implementasinya, konsep maritim yang tadinya jadi harapan banyak kalangan usaha justru terkesan Indonesia kehilangan arah pada sektor maritim ini. Banyak kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberi nilai positif bagi swasta nasional di sektor ini. Sampai sekarang cita-cta untuk meningkatkan potensi angkutan laut pun masih belum banyak pengaruhnya, karena kebijaksanaan yang ada tidak berpihak kepada industri dan jasa maritim nasional.

> "Selama masalah-masalah tersebut tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka industri pelayaran nasional tidak mampu bersaing dengan asing. Karena di negara lain sudah memberikan semua insentif tersebut, sedangkan kita belum mendapatkan itu semua"
>
> **ASMARI HERI**
> Ketua Komite Tetap Bidang Perhubungan Kadin Indonesia

Sebut saja pelayaran, PBM, dan sektor lainnya. Lemahnya insentif bagi bisnis pelayaran dibandingkan Negara-negara ASEAN maupun Negara maritim lainnya membuat perusahaan pelayaran nasional tak mampu bersaing pada tingkat regional maupun internasional.

Kenapa Indonesia sulit menyaingi Singapura atau Malaysia, dua Negara yang selalu jadi *comparative* di sektor pelabuhan. Itu karena pajak penghasilan badan di Indonesia dipatok 25%, sedangkan Singapura maupun Malaysia 0%. Lalu PPN bunker Indonesia 10%, Singapura maupun Malaysia 0%. Pajak penghasilan kru di Indonesia 5-30% sedangkan kedua Negara tadi 0%. Biaya modal Indonesia mencapai 10-12%, sementara Singapura atau Malaysia 4-5%.

Hal-hal itulah yang menurut Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) **Carmelita Hartoto, Soenarto** (Dirut PT Gurita Lintas Samudera) maupun **Asmari Heri** (Ketua Komite Tetap Bidang Perhubungan Kadin Indonesia) menjadi kendala utama pelayaran nasional tak mampu bersaing dengan asing.

"Selama masalah-masalah tersebut tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka industri pelayaran nasional tidak mampu bersaing dengan asing. Karena di negara lain sudah memberikan semua insentif tersebut, sedangkan kita belum mendapatkan itu semua," kata mereka secara terpisah kepada *INSA News*.

Padahal, obsesi pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kejayaan maritim sebagaimana dulu di era 80-an, ketika kapal-kapal Djakarta Lloyd sanggup mengibarkan bendera merah putih hingga ke berbagai negara luar.

Namun, keinginan pemerintah itu jangan sampai terkubur kembali, karena kebijakannya sendiri yang belum 100% berpihak pada usaha dalam negeri. Jangan sampai kita dicap sebagai pencintraan saja, seperti yang diucapkan Ketua Umum Ginsi **Anton Sihombing**.

Mungkin 'mimpi' pemerintah menjadikan Indonesia poros maritim bisa terealisasi, jika biaya pajak yang tinggi, tarif kepelabuhanan yang terus meningkat, aturan teknis yang belum setara dengan negara lainnya hingga tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum di laut (*Sea and Coast Guard*) dapat dirubah oleh Presiden Jokowi seperti yang dilakukan oleh pemerintah Singapura maupun Malaysia.

Pemerintah bolehlah optimistis mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim dunia, dengan fokus memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan.

Namun, itu tadi sepanjang pajak-pajak masih memberatkan dunia usaha, dan penegakan hukum di laut belum berpihak pada pelaku bisnis lokal, maka 'mimpi tinggallah mimpi'.

Meski Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar seluruh instansi dan *stakeholder* terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangun sektor maritim melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Tapi, sekali lagi kalau pemerintah sendiri juga belum memberikan keringanan seperti usulan swasta pelayaran maupun sektor kepelabuhanan, dan jika masih 'setengah hati', lupakan saja Indonesia dapat mewujudkan poros maritim dunia.

Kalaulah sekarang ada program tol laut, pemanduan di Selat Malaka, serta *direct call* kapal besar dengan tujuan internasional, itu semua sebenarnya sudah ada dari dulu, minus pemanduan selat malaka.

Kita boleh bangga sebagai bangsa 'bahari', tetapi kita akan lebih berbangga lagi jika pemerintah sanggup mewujudkannya, jangan setegah hati. Caranya mudah, apa yang dilakukan pemerintah Singapura dan Malaysia atau Negara-negara lain, lakukanlah dan berikanlah. Lepaskan kepentingan politik, dan kelompok, buatlah kebijakan yang berpihak pada usaha dalam negeri, pasti obsesi untuk mengembalikan kejayaan maritim dapat tercapai. ●

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mewakili Indonesia dalam Annual General Meeting Asian Shipowners' Association (ASA) yang diselenggarakan ke-26 di Taipei pada 24-25 Mei 2017 dengan NACS selaku tuan rumah.

PEMERINTAH HANYA AKUI INSA CARMELITA HARTOTO

Pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Laut **A. Tonny Budiono** akhirnya menyudahi kemelut INSA. Dirjen Laut melalui surat bernomor UM.003/41/10/DJPL-17 tertanggal 26 Mei 2017, telah menyampaikan edaran ditujukan kepada para Kepala Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Utama, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, para KSOP, dan para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang isinya memberitahukan mengenai status legal persatuan pengusaha pelayaran niaga (INSA).

Kata Dirjen Laut Tonny Budiono dalam surat edarannya itu menyampaikan supaya para aparat di jajarannya, termasuk *stakeholders* tersebut dapat mengetahui akan legalitas INSA.

Dengan dikeluarkannya surat edaran yang didasari atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 66/G/2016/PTUN. JKT tanggal 30 Agustus 2016 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) No. 315/B/2016/PTTUN JKT tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana disampaikan melalui surat DPP INSA No. 071/HUBLA/V/2017, jelas bahwa pemerintah (Perhubungan Laut) mengakui INSA yang beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 10 Jakarta Pusat, dengan Ketua Umum **Carmelita Hartoto**.

Adanya surat edaran Dirjen Laut tersebut, sejumlah DPC INSA di seluruh Indonesia menyambut baik dan mengapresiasi positif terhadap Dirjen Perhubungan Laut. Karena dengan adanya surat tersebut semakin memperjelas bahwa INSA hanya satu dibawah kepemimpinan Carmelita Hartoto.

"Kami menyambut gembira dengan adanya surat edaran Dirjen Laut, dan akhirnya kebimbangan kami di lapangan berakhir sudah, karena sudah jelas bahwa INSA yang diakui ya INSA dibawah bu Meme (Carmelita Hartoto-red)," katanya.

Pernyataan itu datang dari DPC INSA Jaya, DPC INSA Semarang, DPC INSA Surabaya, DPC INSA Makassar, DPC INSA Lampung, dan sebagainya.

Mereka berharap dengan INSA hanya satu, kedepan supaya organisasi ini semakin bagus, dapat memberi kontribusi untuk kemajuan dunia maritim pada umumnya.

Pengakuan Kepada Carmelita Hartoto

Begitu pentingnya persoal-persoalan yang dihadapi perusahaan-perusahaan pelayaran di dunia dari mulai masalah ekonomi yang belum pulih secara penuh, juga masalah-masalah teknis dan ketentuan aturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga dunia. Oleh karena itu dalam bulan-bulan terakhir ini dinamika yang terjadi di bisnis pelayaran Asia juga ikut kena imbas. Dan ini perlu dibicarakan sesama perusahaan pelayaran antar negara.

Sementara itu Asian Shipowners Association (ASA) juga telah melakukan pertemuan dengan INSA dalam acara tahunannya di Grand Hotel Taipei, pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan beberapa hal, terutama mengenai aturan IMO (*International Maritime Organization*) yang berefek kepada *shipping*.

Pertemuan Asian Shipowners Association (ASA) dengan INSA dalam acara tahunannya di Grand Hotel Taipei, bahas aturan IMO (International Maritime Organization) yang berefek kepada shipping.

Sekretaris Umum DPP INSA **Budhi Halim** kepada *INSA News* menyatakan, sedikitnya ada lima hal yang dibahas pada pertemuan ASA kali ini.

Kelima hal itu, ungkap Budhi, yakni *ship crewing*, keamanan navigasi dan lingkungan (*safe navigation & environment*), lalu mengenai *ship economic review,* kemudian masalah asuransi kapal dan kewajibannya (*ship insurance & liability*), serta kapal daur ulang (*ship recycling*).

Pada pertemuan itu, ASA juga hanya mengakui INSA Pimpinan Carmelita Hartoto, di Jl. Tanah Abang III No.10 Jakarta Pusat. Bahwa sesuai ketentuan, setiap negara hanya diakui dan diwakili oleh satu asosiasi, dan untuk Indonesia diwakili oleh INSA pimpinan Carmelita Hartoto.

Pengakuan organisasi pelayaran dunia ini menggambarkan bahwa INSA yang sah dan legal, serta diakui adalah INSA pimpinan Carmelita Hartoto.

Apalagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memenangkan Carmelita Hartoto dan Budhi Halim dalam perkara INSA melawan Johnson W. Sutjipto.

Hanya Ada Satu INSA

Seperti diketahui dualisme INSA sebenarnya sudah berakhir dengan adanya keputusan inkrah dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak pengajuan gugatan banding Johnson W. Sutjipto atas putusan PTUN di tahun 2016 lalu.

Menanggapi adanya pelantikan DPC INSA Priok, dan Marunda yang dilakukan pihak Jonson, (17/5) lalu, Budhi Halim, Sekjen DPP INSA mengungkapkan, secara *de jure* maupun *de facto* di Indonesia hanya ada satu INSA yang berdiri sejak 1967, beralamat di Tanah Abang III No. 10 Jakarta Pusat. "Saat ini ketua umumnya Carmelita Hartoto," ujarnya.

Menurut Budhi, sudah jelas bahwa sidang PTUN pertama dan selanjutnya banding, keputusannya yang sah adalah INSA di Tanah Abang III No. 10 Jakpus.

"Usaha kasasi mereka (Johnson-red) sudah ditolak karena tak memenuhi syarat formal melewati batas waktu sehingga tak dapat diteruskan ke Mahkamah Agung (MA), artinya keputusan PTTUN itu sudah tetap atau inkrah," jelas Budhi.

"Kami juga sudah melakukan somasi, tapi jika masih tidak diindahkan kami akan lanjut ke langkah gugatan," ancam Budhi Halim.

Sementara itu, kuasa hukum Carmelita Hartoto dan Budhi Halim, Alfin Sulaiman SH. MH menyatakan dengan adanya masalah tersebut, pihaknya telah melayangkan surat kepada Johnson Sutjipto dan *Law Office* Amir Syamsuddin & Partner tertanggal 16 Mei 2017, menegur dengan keras Johnson dan minta kepada Johnson serta pihak-pihak terkait agar tidak menggunakan atau mengatasnamakan badan hukum INSA sebagaimana penundaan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) Jakarta yang diperkuat oleh putusan PTTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum.

"Kepada lembaga negara, perusahaan, pihak swasta untuk tidak lagi melakukan hubungan dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan badan hukum tersebut selain kepada DPP INSA pimpinan Carmelita Hartoto dan Budhi Halim untuk mencegah implikasi adanya tuntutan hukum dari klien kami dikemudian hari," kata Alfin.

Apabila setelah surat peringatan ini dikeluarkan, pihak Johnson masih menggunakan atau mengatasnamakan dirinya sebagai ketua INSA, kata Alfin, maka kliennya akan mencadangkan hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata. "Ini sudah peringatan kedua," ujarnya. ●

Partisipasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dalam acara UK Marine Capability Workshop yang diselenggarakan Department for International Trade pada 4 Mei 2017 di kantor Kedutaan Inggris, Jakarta.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (ketiga kiri) foto bersama istri Menhub Ny. Endang Budi Karya Sumadi (keempat kanan) seusai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Kamis (20 April 2017).

DPP INSA melakukan pertemuan dengan DPC INSA Cirebon di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat, pada 18 April 2017, membahas tentang rencana Pelindo II melakukan penyesuaian tarif di Pelabuhan Cirebon.

(ki-ka) Sekretaris Umum INSA Budhi Halim, Sekjen ASA Kwang-Ho (Harry) SHIN, MASA Chairman Datuk Ir Nordin Mat Yusoff, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, SSA Executive Director Michael Phoon di acara Singapore Navy's 50th International Maritime Review 2017

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (kanan) bersama Doris Magsaysay Ho pemilik Perusahaan Pelayaraan Magsaysay Filipina (kiri) dan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Axton Salim (tengah) pada acara Forum Business Matching di Manila, Philippines 28-29 April 2017

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Kemaritiman yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada 4 Mei 2017 di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Acara ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto bersama dengan Presiden RI Jokowi di acara Indonesia - Hongkong Business Meeting yang dilaksanakan pada 1 Mei 2017 di Hotel Conrad, Hongkong. Pada pertemuan ini, Presiden Jokowi mengajak investor Hongkong untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (kiri) bersama mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo (kanan) saat kunjungan kerja ke Manila, Philippines 28-29 April 2017.

(ki-ka) Sekretaris Umum INSA Budhi Halim, Dirjen Hubla A. Tonny Budiono, Dubes RI untuk Singapore I Gede Ngurah Swajaya, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum II INSA Darmadi Go, Dewan Penasehat INSA Theo Lekatompessy.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto berfoto bersama di stand INSA pada IAPH Bali 2017

(ki-ka) IAPH Bali 2017. Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto, Wakil Sekretaris Umum INSA Standly Rojali, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.

Ketua Umum INSA Carmelita bersama Li Ka-shing, pemilik CK Hutchison Holdings Limited di acara Indonesia - Hongkong Business Meeting yang dilaksanakan pada 1 Mei 2017 di Hotel Conrad, Hongkong.

INSA dan BPSDM Kemenhub Gandeng Ponpes Ikut Program Diklat Kepelautan Siap Kerja

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan kesempatan kepada siswa-siswa pondok pesantren (ponpes) di Jakarta untuk mendapat pendidikan pelatihan kepelautan siap kerja.

Pemberian bantuan pendidikan kepelautan ini merupakan tindaklanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU/nota kesapahaman) *Corporate Social Responsibility* (CSR) tentang Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepelautan Siap Kerja antara INSA dengan BPSDM Kemenhub.

Ketua Bidang Pengembangan SDM/Pelaut INSA **Lisda Y. Satria** mengatakan, nota kesepahaman yang ditandatangani bersama tersebut sudah menunjukan nilai positif untuk kebaikan dunia pendidikan dalam industri maritim. Program ini tidak hanya dikhususkan untuk SMK pelayaran saja, tetapi pemerintah telah mengembangkannya ke pesantren-pesantren.

"Artinya program poros maritim pemerintah pengembangnnya betul-betul secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat," kata Lisda kepada INSA News di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat.

Lisda menuturkan saat ini ada dua pesantren di Jakarta yang tertarik pada program ini, yakni pondok pesantren Yayasan As Saulia dan Yayasan Al Wathoniy. Program ini tentunya memberikan kesempatan bagi siswa-siswa pesantren untuk bekerja di atas laut dimana selama ini hanya bekerja di lingkungan darat. "Kita memberikan kesempatan peluang kepada masyarakat lainnya untuk bekerja di bidang kemaritiman," tuturnya.

Dikatakan Lisda, program ini juga arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat kurang mampu yang berpotensi dan usia produktif untuk dididik agar memiliki keahlian khususnya di sektor industri maritim.

Program ini, lanjut Lisda, salah satu wujud komitmen INSA dan BPSDM demi membangun poros maritim bersama pemerintah dengan cara meningkatkan mutu SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kepelautan terpadu. INSA akan menyerap beberapa kader-kader yang lulus untuk ditempatkan di kapal-kapal perusahaan pelayaran nasional anggota INSA sesuai dengan kebutuhan, serta standar dan prosedur yang berlaku di masing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA.

Kepala Bidang Pendidikan Pusat Pengembangan Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan **Capt. Anugrah** mengatakan, pada tahap awal ini INSA dan BPSDM Kemenhub memberikan kesempatan kepada 100 siswa-siswa pondok pesantren di wilayah Jakarta untuk mengenyam pelatihan kepelautan. Siswa-siswa tersebut nantinya dididik di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta selama satu bulan tanpa dipungut biaya sepeserpun.

"Angkatan pertama dimulai bulan Mei. Mereka akan mendapatkan tiga sertifikat, yakni BST (*Basic Safety Training*), AFF (*Advance Fire Fighting*), SAT (*Security Awareness Training*). Kemudian juga rating dek dan mesin kemudian dokumen pelaut," sebut Anugrah.

Pendidikan selama satu bulan ini, kata Anugrah, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang memiliki potensi supaya memenuhi standar minimum bekerja di atas kapal. Setelah itu, INSA akan membantu para siswa-siswa yang telah lulus ini diberdayakan untuk menjadi kru di atas kapal.

Pimpinan Pondok Pesantren Yayasan As Saulia **Ustad Mahmud** mengapresiasi kerja sama INSA dengan BPSDM Kemenhub dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Mahmud berharap program ini terus berkembang kedepannya.

"Kita merespon dan mendukung program ini. Semoga terus ada sehingga anak bangsa bisa bekerja di negerinya sendiri," pungkas Mahmud. ●

(ki-ka) Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Dirut Pelindo II Evlyn G. Masassya saat berkunjung ke stand INSA .

MENTERI LUHUT ke Stand INSA

Wilayah laut kita ini menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim, **Luhut B. Panjaitan,** lebih dari 75% dibanding daratan dengan demikian seharusnya 75% warga Indonesia lebih berorientasi ke laut. Hanya sayang masih sedikit sekali studi kita mengenai kekayaan laut, begitu juga pengetahuan kita mengenai laut sangat kecil. Oleh sebab itu energi yang ada kurang dimaksimalkan bahkan banyak masyarakat kita yang belum mengetahui kelautan.

"Belum lagi kita berbicara masalah tol laut, sekarang pemerintah membangun angkutan Roro dari Jakarta ke Semarang, Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Lampung. Trayek-trayek tersbut satu kali rute, Roro itu bisa mengangkut 169 truk-truk besar, dengan harapan akan membuat *cost* transportasi kita turun, dengan demikian jalan darat lebih longgar. Untuk itu konsep seperti ini perlu kita kembangkan," Kata Luhut di sela-la acara IAPH ke-30 yang digelar 7-12 Mei di Nusa Dua Bali.

Oleh karena itu pembangunan yang berlangsung, katanya, harus dilakukan di segala bidang secara berkesinambungan, "misalnya potensi yang saat ini kembangkan wilayah Sumbawa untuk bisa menjadi lumbung padi atau lumbung pangan bisa didistribusikan melalaui laut. Itulah yang kita namakan penanganan secara holistik. Jadi tidak bisa penanganan ini dilakukan oleh sendiri-sendiri, harus dalam tim," tambahnya.

Seperti diketahui Indonesia menjadi tuan rumah konferensi pelabuhan se-dunia atau The International Association of Ports and Harbors (IAPH) ke-30 yang digelar, 7-12 Mei 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali.

Konferensi yang dihadiri oleh sekitar 1.000 pelaku industri maritim dan logistik dunia merupakan ajang penting bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) industri kepelabuhan dunia untuk membahas dan bertukar pikiran terkait dengan perkembangan industri kepelabuhanan.

Menteri Luhut mengatakan, penyelenggaraan konferensi ini membuka peluang investasi bagi Indonesia. Maka dari itu, acara ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan membangun jaringan, dan menggali potensi bisnis dari para peserta negara lain.

Salah satu stand yang dikunjungi oleh Menteri Luhut adalah stand Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Menteri Luhut disambut langsung oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto beserta Wakil Sekretaris Umum INSA Standly Rojali, Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto, dan Wakil Ketua Bidang Keanggotaan INSA Dian A. Imirsyah.

Partisipasi INSA yang didukung oleh PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, PT Bandar Abadi, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Andhika Lines, PT Gurita Lintas Samudera, PT Pan Maritim Wira Pawitra, PT SOECHI Lines Tbk dalam ajang IAPH merupakan bentuk komitmen INSA beserta para anggotanya untuk mendukung cita-cita pemerintah Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim. ●

DPC INSA Cirebon Tak Setuju Penyesuaian Tarif di Pelabuhan Cirebon

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Cirebon keberatan atas rencana PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Cirebon melakukan penyesuaian tarif layanan tambat, pandu, dan tunda di Pelabuhan Cirebon. Pasalnya, penyesuaian tarif di pelabuhan tersebut bisa mencapai 300%.

Ketua DPC INSA Cirebon **Adhe Purnama** mengatakan, alasan DPC INSA Cirebon keberatan atas rencana penyesuian tarif tersebut lantaran tarif yang berlaku di Pelabuhan Cirebon saat ini sudah cukup tinggi terutama tarif layanan tunda yang akan mengalami penyesuaian tarif cukup siginifikan. Untuk penyesuaian tarif layanan tunda, Pelindo II Cabang Cirebon berencana akan melakukan penyesuaian hingga 200% hingga 300%.

"Kita sebagai pengurus kan membantu agar penyesuaian tarif ini yang wajar atau pun yang eksisting bisa dievaluasi lagi karena sudah tinggi," kata Adhe kepada *INSA News* di Jakarta.

Adhe menuturkan salah satu yang menjadi pertimbangan Pelindo II Cabang Cirebon melakukan penyesuaian tarif di Pelabuhan Cirebon dikarenakan biaya operasional pelabuhan yang tidak lagi sesuai. Menurut Adhe, rencana penyesuaian tarif yang terlalu tinggi tidak sejalan dengan semangat pemerintah menekan biaya logistik nasional.

Sebagai cabang, lanjut Adhe, DPC INSA Cirebon merasa perlu membicarakan hal ini kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA untuk meminta masukan-masukan yang bisa dijadikan rekomendasi DPC INSA Cirebon untuk mengambil langkah yang tepat agar kebijakan ini tidak merugikan industri pelayaran nasional khususnya di Cirebon.

Dikatakan Adhe, pelayanan di Pelabuhan Cirebon sudah baik akan tetapi perlu ditingkatkan lagi apabila penyesuaian tarif jadi berlakukan. Sebab, saat ini perusahaan pelayaran masih kesulitan mendatangkan kapal-kapal besar ke Pelabuhan Cirebon karena kedalaman alur masih sekitar lima meter yang hanya bisa dimasuki kapal-kapal kecil dan dalam dua tahun belakangan ini jadwal pengerukan alur belum terlaksana.

"Kegiatan di Pelabuhan Cirebon 80% banyak batubara. Sisanya pupuk, aspal, minyak goreng tapi volume 3000 ton, lebih dari itu tidak bisa masuk. Kita sebagai pengusaha mau dong datangkan kapal besar. Ini menjadi masukan juga bagi Pelindo tapi fasilitas yang ada tidak memungkinkan terutama alur," tuturnya.

Adhe menegaskan bahwa DPC INSA Cirebon meminta kepada Pelindo II Cabang Cirebon menjelaskan secara transparan terkait penghitungan penyesuaian tarif tersebut. Jika penyesuaian tarif terlalu tinggi akan berdampak kepada melambungnya biaya operasional yang harus dikeluarkan perusahaan pelayaran sehingga akan menghambat daya saing industri pelayaran nasional.

"Harapan saya tidak ada kenaikan karena sudah tinggi. Saya sebagai pengurus punya tanggung jawab jangan sampai disalahkan. kita kan market Pelindo," pungkasnya. ●

> "Kita sebagai pengurus kan membantu agar penyesuaian tarif ini yang wajar atau pun yang eksisting bisa dievaluasi lagi karena sudah tinggi"
>
> **ADHE PURNAMA**
> Ketua DPC INSA Cirebon

CARMELITA HARTOTO

RAIH DUA PENGHARGAAN

Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) **Carmelita Hartoto** raih dua penghargaan sebagai bukti kiprahnya di dunia bisnis industri pelayaran nasional. Hal ini menjadi pemicu Carmelita Hartoto untuk semakin memberikan kontribusi kepada organisasi dan industri pelayaran nasional.

Kedua penghargaan itu adalah sebagai Kartini Masa Kini 2017 pilihan *Indonews.id* dan *Marketeers Youth, Women, Netizen (YWN) Awards 2017* dari Markplus, Inc.

Penghargaan Kartini Masa Kini 2017 diserahkan oleh perwakilan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Paman Nataatmadja dan Pimpinan Umum *Indonews.id* Rio Sarwono. Acara penganugerahaan yang

dihadiri sejumlah tokoh nasional ini digelar di Balai Sarwono, Jakarta, Rabu (26/04).

Carmelita terpilih sebagai Kartini Masa Kini 2017 bersama 12 perempuan lainnya, yang antara lain CEO PT Mustika Ratu Putri Kuswisnuwardhani, Walikota Tangerang Selatan Hj Airin Rachmi Diany Wardana dan pendiri dan pemilik STIKOM The London School of Publis Relations Prita Kemal Gani.

Pemimpin Redaksi *Indonews.id* **Asri Hadi** mengatakan penghargaan tersebut digelar untuk memperingati hari lahir Kartini pada 21 April. Namun lebih dari itu, penghargaan ini bertujuan menimba air semangat yang telah diwariskan RA Kartini.

"Penyelenggaraan acara ini bertujuan agar mereka yang terpilih menjadi Kartini 2017 ini menjadi inspirasi dan contoh bagi kaum perempuan Indonesia. Jika mereka bekerja cerdas, menjaga integritas dan selalu berbuat baik kepada sesama seperti Kartini, mereka juga akan berhasil seperti penerima penghargaan ini," katanya.

Menurutnya, pemilihan tokoh perempuan yang mendapat penghargaan Kartini Masa Kini 2017 telah melalui seleksi yang ketat oleh tim berkompeten di bidangnya. Perempuan yang meraih penghargaan ini dinilai telah memberikan karya nyata dan berguna, serta memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitarnya terutama kaum perempuan.

Sementara penghargaan *Marketeers Youth, Women, Netizen 2017* diserahkan langsung oleh *Vice President Chief Corporate Officer* Markplus.INC, **Hendra Warsita**. Acara ini dilaksanakan di Wow Stage – Atrium Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Minggu (7/05).

Deputy CEO Markplus, **Inc Jacky Masussry** mengatakan, ada tiga subkultur yang memengaruhi dinamika dunia dan pasar sekarang ini, yakni *Youth, Women, Netizen* (YWN). Ketiganya menjadi motor penggerak perubahan saat ini. Melihat signifikannya peran YWN, *Marketeers* memilih dan memberi penghargaan untuk mereka yang cukup berpengaruh dalam bidangnya masing-masing, baik di dalam dunia profesional, *entrepreneurship, arts, sports,* atau s*ocial activism*.

"Mereka adalah orang-orang yang tidak sekadar berprestasi, tetapi juga produktif, kreatif, sekaligus *entrepreneurial* yang mampu mengembuskan angin perubahan, baik di komunitas, masyarakat, maupun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik," kata Jacky.

Carmelita yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Andhika Lines mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan acara penghargaan Karitini Masa Kini dan *Marketeers Award Youth Women Netizen 2017* sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang secara telah total bekerja dan mengembangkan diri di bidangnya masing-masing.

"Penghargaan ini akan memecut saya dan para penerima penghargaan lainnya untuk lebih berprestasi, produktif, kreatif sehingga dapat menularkan inspirasi dan memberikan air semangat kebaikan bagi masyarakat dan juga bangsa Indonesia," pungkasnya. ●

MENYOAL MODAL DI USAHA ANGKUTAN LAUT

Pencabutan Modal Usaha angkutan laut dan keagenan kapal yang tertuang pada Permenhub Nomor PM 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan dapat memicu persaingan tidak sehat di industri pelayaran.

Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners' Association (INSA) **Witono Suprapto** mengatakan, perlunya persyaratan kepemilikan modal usaha adalah agar perusahaan-perusahaan pelayaran bisa bersaing secara sehat dan menunjukkan bahwa perusahaan pelayaraan tersebut memiliki kredibilitas.

"Tujuannya adalah supaya tidak banyak perusahaan yang bersaing gontok-gontokan. Jadi benar-benar perusahaan yang sudah siap untuk terjun di bisnis itu," kata Witono kepada *INSA News.*

Witono mengungkapkan INSA sudah mengusulkan ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar modal dasar dibagi menjadi tiga kategori, yakni perusahaan skala besar, menengah, dan kecil. Hal ini dimaksudkan agar *freight* angkutan laut menjadi lebih kompetitif.

"Kalau dilepas begitu saja tanpa ada satu segmentasi banyak perusahaan bersaing satu sama lain," ujarnya.

Witono menilai, pencabutan persyaratan kepemilikan modal dasar bertentangan dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan harus ada modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Menurut Witono, dicabutnya persyaratan kepemilikan modal akan mengacaukan sistem yang saat ini sudah berjalan. Dijelaskannya, dulu keagenan kapal berada dibawah perusahaan pelayaran yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) sehingga apabila agen kapal melakukan wanprestasi, maka induk perusahaan pelayaran bisa menuntut agennya.

Witono mencontohkan, katakanlah ada perusahaan 'kaki lima' dipermudah untuk berinvestasi keagenan kapal. Kemudian perusahaan ini melakukan suatu wanprestasi, maka perusahaan pelayaran asing tidak bisa menuntut perusahaan tersebut. Lalu, perusahaan pelayaran asing akan menuntut pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Apakah pemerintah mau mengambil alih tanggung jawab itu?

"Bikin perusahaan harus ada kredibilitasnya. Jangan perusahaan abal-abal," tegasnya.

Witono berharap peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah mampu menciptakan biaya logistik nasional rendah, efisien dan iklim usaha yang sehat bagi industri pelayaran nasional. ●

> "Tujuannya adalah supaya tidak banyak perusahaan yang bersaing gontok-gontokan. Jadi benar-benar perusahaan yang sudah siap untuk terjun di bisnis itu"
>
> **WITONO SUPRAPTO**
> Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners' Association (INSA)

> "Pengembangan lini bisnis Samudera Logistics juga terus dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Melalui jaringan kantor milik yang dimiliki di berbagai negara Asia, Samudera Logistics terus mengembangkan kerjasama penggarapan pasar logistik dengan sejumlah mitra strategis"
>
> **BANI MULIA**, Dirut PT Samudera Indonesia Tangguh

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BARU DI GROUP SAMIN, DIDIRIKAN

PT Samudera Indonesia Tbk (Samudera Indonesia) melakukan restrukturisasi organisasi dan mempertajam fokus usaha di masing-masing lini bisnisnya. Tahun 2016, misalnya, Samudera Indonesia mendirikan PT Samudera Agencies Indonesia (SAI) sebagai unit usaha yang fokus menangani bisnis keagenan kapal di bawah lini bisnis Samudera Agencies.

Kata **Masli Mulia**, Dirut PT Samudera Indonesia, SAI efektif mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) per 16 Maret 2017. "Melalui SAI, Samudera Agencies dapat melakukan kegiatan keagenan perusahaan pelayaran asing dengan lebih efisien berbekal pengalaman lebih dari 60 tahun di industri keagenan di Indonesia," ujarnya kepada pers usai acara RUPS perseroan, di Jakarta.

Sebelumnya, ucap Masli, Samudera Indonesia juga telah mendirikan PT Samudera Terminal Indonesia (STI) untuk mengelola bisnis pengelolaan terminal dan kepelabuhanan dengan lebih fokus.

Restrukturisasi pengalihan saham efektif dilaksanakan pada 2 Mei 2016 yang menghasilkan STI sebagai induk (*sub-holding*) dari lima anak perusahaan Samudera Terminal. "Saat ini STI membawahi empat terminal yang berlokasi di Tanjung Priok dan Palaran, Kalimantan Timur," ungkapnya lagi.

Menurut mantan ketua umum Gafeksi (sekarang ALFI) ini, Samudera Indonesia juga melakukan berbagai pengembangan di lini bisnis Samudera Shipping baik untuk bisnis pelayaran di Indonesia maupun di luar negeri.

PT Samudera Asahi Shipping (SAS) didirikan bersama sebagai perusahaan *joint venture* antara Samudera Indonesia dengan Osaka Asahi Kaiun Co Ltd dan PT Jasindo Duta Segara.

SAS akan memasuki bisnis kepemilikan kapal di Indonesia. Samudera Indonesia juga telah menandatangani kesepakatan dengan mitra AST Inc dari Jepang untuk bersama-sama mengembangkan PT Samudera Amanah Tanker (SAT) yang merambah bisnis pelayaran gas domestik di Indonesia. Sedangkan Samudera Bharat Feeder Pvt Ltd didirikan bersama dengan United Liner Shipping Services LLP untuk menggarap pasar pelayaran domestik di pesisir India.

"Pengembangan lini bisnis Samudera Logistics juga terus dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Melalui jaringan kantor milik yang dimiliki di berbagai negara Asia, Samudera Logistics terus mengembangkan kerjasama penggarapan pasar logistik dengan sejumlah mitra strategis," jelas **Bani Mulia**, Dirut PT Samudera Indonesia Tangguh menambahkan,

Melalui anak usaha Silkargo Logistics (Singapore) Pte Ltd, Samudera Logistics memasuki bisnis warehousing di Malaysia dengan mendirikan Seahawk Tangguh Sdn Bhd bersama mitra Seahawk Global Land Sdn Bhd.

Masli menambahkan, lini bisnis Samudera Property dikembangkan melalui unit usaha PT Samudera Properti Indonesia yang saat ini difokuskan untuk mengembangkan aset lahan dan aset properti milik Samudera Indonesia yang terletak di berbagai kota di Indonesia.

"Kelima lini bisnis Samudera Indonesia tersebut dikembangkan dan dikelola secara fokus oleh tim manajemen yang *dedicated* dan ahli di bidangnya masing-masing," tuturnya.

Hasil RUPS

Pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2016 Rabu 24 Mei 2017, memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp. 500 / lembar saham, atau sebesar Rp. 81.878.000.000,- . Dividen Tunai tersebut dibayarkan dengan Pay Out Ratio 50% atas Laba Bersih 2016 sebesar USD 12.267.485.

RUPS juga memutuskan perubahan pengurus Perseroan dengan mengangkat Komisaris Independen baru yaitu Bapak Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, mengisi posisi kosong yang ditinggalkan oleh Alm. Wisnoentoro Martokoesoemo. RUPS Luar Biasa Samudera Indonesia juga memutuskan persetujuan pemegang saham akan rencana Perseroan melakukan *stock split* dengan rasio 1:20. Rasio ini akan menghasilkan nilai nominal saham yang sebelumnya Rp500 per lembar menjadi Rp25 per lembar. ●

PROPAN MARINE SIAP BERKONTRIBUSI DALAM MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA

> "Jadi tidak mungkin kami mempertaruhkan reputasi perusahaan dengan produk marine coating jika tidak sesuai standar kebutuhan pelayaran"
>
> HENDRA ADIDARMA
> Pendiri sekaligus
> Pemilik PT Propan Raya

PT Propan Raya yang merupakan salah satu produsen cat nasional terbesar terus bergerak optimis melebarkan jaring pasar dengan mengeluarkan produk *marine coating* atau cat kapal laut. Produk *marine coating* yang diluncurkan sejak dua tahun silam adalah buah dari keseriusan perusahaan mengembangkan produk secara terus menerus.

Produk *marine coating* ini merupakan tekad Propan Raya untuk ikut terlibat menyukseskan program Nawa Cita pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, yang salah satu poinnya menekankan bahwa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta menjadi poros maritim dunia.

Ini juga bentuk dukungan Propan Raya terhadap kegiatan industri pelayaran nasional agar lebih efisien dengan menawarkan harga cat yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk.

Mesin RPS Propan berteknologi tinggi.

Hendra Adidarma sebagai pendiri sekaligus pemilik PT Propan Raya mengatakan, produk cat kayu Impra dan Ultran Propan Raya telah menjadi market leader di Indonesia dan Asia Tenggara. Atas prestasi itu, tentunya perusahaan mempertahankan reputasi tersebut dengan mengeluarkan produk *marine coating* sesuai dengan standar kebutuhan pelayaran nasional.

"Pada jenis cat kayu kami menjadi *market leader* di pasar, karena reputasi kami sebagai produsen cat sudah dikenal baik oleh publik. Jadi tidak mungkin kami mempertaruhkan reputasi perusahaan dengan produk *marine coating* jika tidak sesuai standar kebutuhan pelayaran," katanya kepada INSA News.

Terhitung sejak 2010, beberapa perusahaan pelayaran nasional telah menggunakan produk Propan dan sebanyak 50 kapal pelayaran nasional dengan beragam jenis dan ukuran kapal, mulai dari ukuran 500 DWT hingga 4000 DWT dengan jenis kapal kargo, tongkang, tanker dan *landing craft tank* (LCT) telah menggunakan produk Propan.

Kualitas produk Propan mampu bersaing bahkan lebih bagus dari merek-merek cat kapal asing,

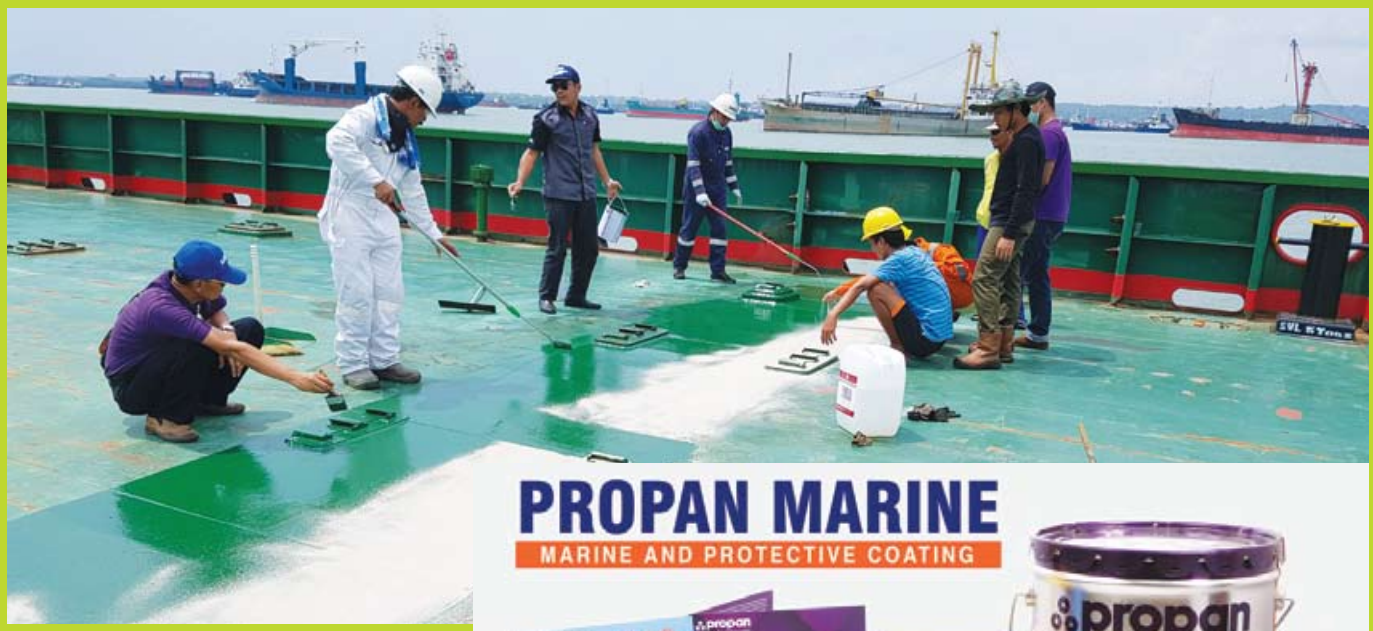

Pengecatan kapal menggunakan Propan Marine

Produk marine coating Propan

dan PT Propan Raya juga tengah memproses sertifikasi standar *International Maritime Organization* (IMO). Harga yang dibandrol pun lebih kompetitif hingga 10%-20% dari harga produk *marine coating* lainnya.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan produk cat luar negeri dengan kualitas yang lebih bagus dan harga yang lebih kompetitif," ungkapnya.

Propan memiliki reputasi sebagai salah satu produk cat nasional yang paling inovatif. Propan telah mengembangkan cat berbasis air yang ramah lingkungan atau *waterbased* pada hampir seluruh jenis catnya. Hingga saat ini, sekitar 60% produk Propan sudah diubah dari dari *solvent based* menjadi produk *waterbased*. Hal ini sesuai perhatian besar perusahaan terhadap masalah pemanasan global.

PT Propan Raya pun memiliki moto: *Go To Waterbased, Save The Planet.* Inovasi yang merupakan 'lompatan' dari Propan Raya dibanding dengan produk yang telah diproduksi oleh merek asing maupun lokal adalah semua produk yang diperkenalkan merupakan produk dengan teknologi terbaru *waterbased,* sekaligus menegaskan PT Propan Raya menjadi yang terdepan dalam penggunaan teknologi.

Reputasi penggunaan teknologi dan kualitas produk PT Propan Raya pun telah diakui dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan penggunaan produk PT Propan oleh beberapa negara, seperti Jepang, Vietnam dan Malaysia.

Penggunaan teknologi *water-based* pada produk cat Propan sangat dianjurkan dalam *maintenance* kapal karena ramah lingkungan dan dapat menghindari bahaya pada kapal yang membawa barang yang mudah terbakar. Produk cat kapal Propan juga telah disesuaikan dengan iklim tropis yang mengacu pada aplikasi kualitas standart (*American Standart Testing & Material*) ASTM dan IMO.

Propan juga memberikan *service excellent* berupa supervisi yang ketat dan andal sesuai keinginan pemilik kapal baik pada saat *dry dock* maupun *maintenance*. Selain itu, perusahan juga akan mendidik para *painting applicator* dan Anak Buah Kapal (ABK) agar dapat mengaplikasi dengan benar dan tepat.

Baru-baru ini, perusahaan juga kembali berinvestasi membuat pabrik cat dengan teknologi terkini dari Jerman yang dikenal sebagai *Rapid Processing System* (RPS) yang mempunyai kapasitas produksi yang besar. ●adv

MARITIME TOLL SHIPS, COME - GO WITHOUT ANY LOADS

All this time, info that was heard about the existence of maritime toll is that it can reduce the cost and the certainty about the availability of in-coming ships. But, different story with the news that came from North Maluku (Malut). Because, this maritime toll ships in Malut were even less interested by businessmen in Ternate. Even more sadly, ship come and go without carrying any load at all.

Businessmen in Malut prefer choosing to use private container ships rather than using maritime toll ships. One of the reasons is that beside the arriving time of ship is too long, and also because this maritime toll ships take the route from Makassar, whereas nearly 100 percent of goods from Malut are supplied from Surabaya.

If we have to go through Makassar the arriving time of goods is too long and have to pay more money compared with if we take the route from Surabaya although by using private ships but the cost is still less expensive and the arriving time will also be on time.

One of the distributors in Malut admitted that the shipping of goods by using maritime toll ships is not effective and not efficient, moreover if we carry goods that are easy to break. "Normally ships directly from Surabaya only take one week to get to Ternate, if by using maritime toll ships it will take two weeks," his statement, the one that did not want to be called his name.

To be confirmed about that matter, the Director of PT Pelni Branch of Ternate Lasinuru stated that ships which arrive in Ternate and Tobelo do not carry anything, and so when go back to Makassar. "Only in the Port of Morotai ships come to carry goods, but go back and without carrying anything," stated Lasinuru.

According to him, most businessmen asked in order the route can be changed, but for Pelni side can't do nothing because this is the program of Ministry of Transportation. "Businessmen want the designated route is just directly from Surabaya only, if from Makassar they don't want it," his statement.

Some businessmen that were contacted also admitted that by using maritime toll ships doesn't mean that the cost of goods will be able to be lower. "The proof is that now approaching Ramadhan, the price of food material need keeps being up and up time after time," his statement.

Therefore, how about if this also happened in other places, because as a matter of fact private ships have also been a lot of them that go through this maritime toll areas, in fact their ships even a lot batter. ●

ARPENI WILL OPERATE RO-RO PRIOK - SURABAYA

The Arpeni Shipping planned to operate Ro-Ro ships with the route of the Port of Tanjung Priok (berth of Cara Terminal) to Gresik, Surabaya East Java starting on the next June 14th 2017, approaching the Lebaran Idul Fitri this year. The trusted resources Ocean Week stated that the corporate committed to implement the transportation of Ro-Ro on those routes in supporting the program of maritime toll from the government.

"The ships are ready, the beginning of June possibly will have to be arrived here." Explained the source in Jakarta, Monday (May 8th) morning.

According to him, for the first operational, Arpeni will just prepare one ship only. At this time is being in process of arranging the documents and administration.

This mentioned ship will be able to accommodate approximately 250 loaded trucks, including the commodities that are loaded in the container. But, the head of the truck will not follow to be shipped. As it is known that earlier, Arpeni has also ever operated Ro-Ro ships with the route of the Port of Tanjung Priok – Surabaya, but only did last for less than one year.

This program for Ro - Ro Jakarta – Surabaya has been long said by either the Minister Coordinator of Maritime Luhut Panjaitan or the Minister of Transportation Budi Karya Sumadi.

"Before Lebaran will have been to be able to be operated. Even possibly will also have Ro-Ro from Priok to Semarang," said the Minister of Transportation Budi to the reporter not long ago. ●

PT SATRIA LAUT PERKASA

SHIPPING AND BROKERING

PT SATRIA LAUT PERKASA

Wisma BNI 46, 48th Fl Suite 30, Kota BNI

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Telp : 021 – 5748890, Fax : 021 - 5748888

Email : satrialautperkasa@gmail.com / igwbudis@yahoo.com

PERUSAHAAN PELAYARAN NUSANTARA
PT TANTO INTIM LINE

Reliable
Transportation
Solution

Head Office
SURABAYA
Jl. Indrapura 29 - 33, Surabaya
Phone: (031) 353 3392 (Hunting)

JAKARTA
Jl. Yos Sudarso 36, Jakarta Utara
Phone: (021) 8067 8000 (Hunting)

www.tantonet.com

PT. AQUARIA SHIPPING
OFFSHORE & MARINE SERVICES

YOUR PARTNER FOR SAFETY
AND SUPPORT AT SEA

PT. Aquaria Shipping is an experienced and reliable Indonesian Domestic Shipping Company providing offshore and marine support services

: Beltway Office Park Building
6th Floor Suite 604
Jl. TB Simatupang No. 41
Jakarta Selatan 12550
: 021- 7811781
: marketing@aquariashipping.co.id